

# POTENSI MODAL SOSIAL PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## *POTENCY OF SOCIAL CAPITAL IN THE BUSINESS GROUPS POVERTY REDUCTION PROGRAM*

**Muhtar**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur.  
**E-mail:** much.ngano17@gmail.com

**Ivo Noviana**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur.  
**E-mail:** inoviana@yahoo.com

### ***Abstract***

*This paper aims to describe potency of social capital in the business groups as a sectoral poverty reduction program, organized by the Social Ministry. Although the poverty reduction programs in Indonesia have long been done, by the government and societies, but in reality, poverty is still a lingering national problem up to now. This paper is a study literature by using of relevant documents and browsing internet. The results of Study shows that social capital's business groups actually have enormous potential to address the socio-economic problems groups members, because in business groups, occured: the process of social learning, interaction with each other, help each other in overcoming problems of socio-economic members. Nevertheless, this potential has not been a positive impact significantly in improving the welfare's member of business groups. This condition, caused the implementation of the business groups has not been supported by reliable and professional human resources at various area levels: centre, district/city, including at the sub-district and village level. To that, suggested, providing a reliable and professional human resources at various levels is must possibility of implementing a series of measures business groups in the field optimally, since the preparation, implementation, and control, as designed.*

**Key words:** social capital, business groups, poverty reduction.

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan potensi modal sosial pada kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai program penanggulangan kemiskinan sektoral yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Disadari, meskipun program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah sejak lama diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, tetapi realitasnya kemiskinan masih menjadi masalah nasional berkepanjangan hingga saat ini. Tulisan ini merupakan studi literatur dengan memanfaatkan dokumen yang relevan dan *browsing* internet. Hasil studi menunjukkan bahwa modal sosial pada KUBE sebenarnya mempunyai potensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi anggota KUBE, karena didalamnya terjadi: proses belajar sosial, saling interaksi, saling membantu dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi sesama anggota. Sungguhpun demikian, potensi tersebut belum memberikan dampak positif yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan anggota KUBE. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena dalam pelaksanaan KUBE belum didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional pada pelbagai tingkatan pusat, daerah: kabupaten/kota, termasuk di tingkat kecamatan dan desa. Disarankan, penyediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional pada pelbagai tingkatan tersebut merupakan keharusan bagi dimungkinkannya melaksanakan serangkaian langkah KUBE di lapangan secara maksimal, sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian, sebagaimana dirancang.

**Kata kunci:** modal sosial, kelompok usaha bersama, penanggulangan kemiskinan.

## PENDAHULUAN

*Founding fathers* dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan kepada penyelenggara negara, untuk: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”. Pesan kuat dari pendiri republik tersebut adalah “hadirnya negara” (Nawa Cita Presiden Joko Widodo, 2014) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Secara spesifik, amanat pendiri republik tersebut dijabarkan pada pasal 34 ayat 1) bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, dan pada ayat 2) “negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dalam Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 21 juga dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: “...penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha”. Terkait itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 7 (1) dikemukakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: “a) pengembangan potensi diri; b) bantuan pangan dan sandang; c) penyediaan pelayanan perumahan; d) penyediaan pelayanan kesehatan; e) penyediaan pelayanan pendidikan; f) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; ...”.

Dalam konteks kekininian Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang intinya pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan

sosial dimaksud meliputi: 1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); 2) Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan 3) Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pelbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebenarnya telah sejak lama diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat, tetapi realitasnya kemiskinan masih menjadi masalah nasional yang berkepanjangan hingga saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen) jumlah penduduk miskin Indonesia. Jika disandingkan data September 2014, yang berjumlah 27,73 juta jiwa (10,96 persen), maka terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 860.000 orang. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah melalui berbagai program yang dilakukannya berupaya keras menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 7-8 persen.

Dalam kaitan itu, Menteri Sosial R.I. sebagai penanggung jawab pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, sesuai kontrak kerja dengan Presiden Joko Widodo, mendapat porsi penurunan penduduk miskin fakir miskin, kelompok rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya sebesar satu persen dari target nasional, melalui: peningkatan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar; meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas. Sebagai respon atas mandat tersebut, secara kelembagaan, pada Kementerian Sosial dibentuk Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemensos RI.

Tulisan ini bertitik tolak dari pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi kelompok fakir miskin di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. KUBE, sebenarnya telah diselenggarakan sejak tahun 1982, dimana penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, *top down*, dan terpusat. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006 dilakukan penyempurnaan, sehingga sejak tahun 2007, pelaksanaan KUBE dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga yang terjadi kemudian adalah bahwa penyaluran bantuan dilakukan langsung kepada KUBE melalui mekanisme perbankan kerjasama dengan BRI tersebut. Dengan demikian bantuan tidak lagi bersifat barang yang harus disediakan oleh Pemerintah (Pusat) melalui pihak ketiga, tetapi disediakan sendiri oleh anggota KUBE (Oetami, 2010).

KUBE merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas sosial ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkat kesejahteraan sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Tujuannya adalah: a) meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial; b) meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin; c) mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin; d) meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial; e) meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan; f) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mem-

cahkan masalah kemiskinan; (g) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (Juklak KUBE 2014: 11-12).

Selanjutnya, melalui KUBE diharapkan terjadi proses belajar sosial antar warga masyarakat/keluarga miskin dalam ikatan kelompok. Bantuan melalui KUBE hanya bersifat stimulan yang realitasnya terbatas secara kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu sangat tidak diharapkan KUBE hanya mengandalkan bantuan dari pihak luar untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Secara bersama-sama mereka harus berpikir dan melakukan tindakan bersama guna mengatasi masalah sosial ekonomi dengan mengerahkan potensi yang dimilikinya. Untuk itu, modal sosial dalam KUBE mempunyai potensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi anggota kelompok, sementara bantuan dari pihak luar merupakan pemicu dalam upaya terwujudnya kemandirian mereka. Dalam kaitan itu, menurut Suharto (2007), pembangunan tidak hanya berkaitan dengan modal ekonomi (finansial)... pembangunan bertautan dengan matra sosial khususnya modal sosial.

Sebagai sebuah konsep sosiologis, modal sosial merupakan pendekatan yang semakin diperhitungkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di banyak negara, termasuk di Indonesia (Rusydi, 2003). Dengan tidak mengurangi arti penting konsep kemiskinan secara konvensional, yang lebih fokus pada upaya peningkatan pendapatan kelompok miskin, dimana mereka lebih pada posisi sebagai obyek perubahan, dan kurang memerhatikan kemampuan, pengetahuan, dan partisipasi mereka —subyek perubahan. Bertolak dari pemikiran seperti itu, tujuan tulisan ini adalah mendeskripsikan potensi modal sosial pada KUBE sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan

dengan pengarusutamaan partisipasi dan pemberdayaan, yang didalamnya terkandung modal sosial. Kajian ini merupakan studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder (dokumen), termasuk browsing dari internet untuk memperoleh bahan-bahan yang dinilai berkaitan dengan tulisan.

## PEMBAHASAN

Seperti dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi, kompleks, dan abstrak, yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari sudut pandang mana mendekatinya. Pada pendekatan lama, kemiskinan (hanya) didekati dari segi deprivasi dalam pendapatan/konsumsi/belanja. Tanpa mengurangi makna konsep kemiskinan yang digunakan pada pendekatan lama tersebut, dimana kemiskinan lebih mereduksi pada terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) (Darwin, 2005: 1). Hal itu sekurangnya tercermin pada pendapat Sayogyo (1978); Tjondronegoro, Soejono & Hardjono, (1996); van Oostenbrugge, van Densen & Machiels (2004), bahwa secara spesifik kesejahteraan dinilai dari kekurangan pendapatan, konsumsi, kepemilikan harta benda baik diam maupun bergerak, aset modal dan stok. Nilai minimum penghasilan rumah tangga miskin adalah kurang dari 1920 kilogram setara beras per rumah tangga per tahun, makin tinggi pendapatan diasumsikan makin baik konsumsi kalori dan gizi. Pada pendekatan baru, kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumber daya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup (Chambers, 1983). Itu sebabnya kemiskinan mempunyai banyak sisi: ekonomi, sosial, dan politik (Harris-White, 2005), dimana secara ekonomi penduduk

miskin tidak memiliki apa-apa (*having nothing*), secara sosial mereka tidak menjadi siapa-siapa (*being nothing*), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (*having no rights and being wrong*).

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial (dalam Darwin, 2005: 5) juga menekankan pada deprivasi terhadap kemampuan sumber daya manusia seperti pengetahuan, standar kelayakan hidup, dan lebih menekankan lagi pada *self-reporting*, *self esteem*, partisipasi, dan pemberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya. Sementara itu, Bappenas (2005: xv) dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak-hak manusia, bahwa masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan

hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial bahkan aspek politik.

Untuk itu, KUBE sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi kelompok fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, dapat merupakan salah satu jawaban/solusi atas permasalahan kemiskinan yang multidimensi tersebut, khususnya secara sosial ekonomi kelompok, karena melalui KUBE tercipta aktivitas sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dari sisi sosial, melalui KUBE, fakir miskin diarahkan untuk dapat berinteraksi sosial dan saling peduli satu sama lain dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian, dari sisi ekonomi melalui KUBE, fakir miskin diarahkan untuk memiliki sumber penghasilan yang tetap, layak dan berkelanjutan, memiliki aset, terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial (Kemensos RI, 2015: 7).

Dengan demikian terlihat jelas bahwa KUBE mempunyai potensi besar dalam penanggulangan kemiskinan, karena berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan mereka. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti: pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga

menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga, dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui KUBE ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti: pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang menganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola, dan lain-lain. Dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok. Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut (Dewi, 2010).

Beberapa pertimbangan KUBE menjadi media dalam penanggulangan kemiskinan adalah: a) dapat dijadikan sarana yang efektif bagi keluarga fakir miskin untuk mengatasi berbagai keterbatasan, seperti: kepemilikan modal, informasi, teknologi dan lainnya secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial; b) dapat dijadikan sarana pembelajaran yang efektif bagi keluarga fakir miskin, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber-daya manusia pada umumnya; c) dapat menumbuhkan kembangkan kemampuan berorganisasi, sehingga memungkinkan keluarga fakir miskin mengoptimalkan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial maupun ekonomi

untuk Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial hidupnya secara efektif dan efisien; d) melalui sistem KUBE dapat menumbuhkembangkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik diantara keluarga fakir miskin maupun dengan masyarakat luas; e) melalui sistem KUBE, memudahkan bagi para pihak yang memberdayakan mereka dalam pelaksanaan pembinaan maupun monitoring. Dengan demikian pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien, baik dari segi pembiayaan, tenaga dan waktu yang digunakan; f) melalui sistem KUBE akan meningkatkan tanggung jawab melalui sistem control internal diantara anggota sehingga menjamin optimalisasi pencapaian hasil, pelestarian dan keberlangsungan program (Kemensos RI, 2015: 8).

Dalam kaitan itu, menurut Dosen dan peneliti Universitas Andalas, Elfindri (2008), beberapa alasan digunakan kelompok dalam pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE, karena kelompok mempunyai kekuatan yang bisa dijadikan dasar bagi para pelaksana program dan pendamping di lapangan adalah: a) kelompok adalah salah satu media untuk mempersatukan masyarakat diberbagai komunitas, karena dalam kelompok berbagai perbedaan dan penafsiran terhadap program bisa dieleminir, maka dengan demikian para pelaksana di lapangan perlu membangun komunikasi dan membangun jaringan sesama kelompok yang ada di daerah sasaran; b) kelompok-kelompok yang terdiri dari individu-individu sebagai bahagian dari anggota masyarakat yang dikelompokkan sebagai sasaran program; c) kelompok merupakan representasi dari keinginan dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh anggotanya dalam melakukan perubahan dan perbaikan. Lebih lanjut Elfindri mengemukakan bahwa salah satu pentingnya kelompok menjadi alat

untuk pencapaian tujuan disebabkan karena kelompok merupakan sebuah kekuatan sosial yang dapat dijadikan sebagai alat peubah di tengah masyarakat, oleh sebab yang demikian kelompok sangat efektif untuk dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk mewujudkan sebuah gagasan, atau ide yang juga sekaligus alat untuk mengimplementasikan gagasan yang telah dikemas dalam bentuk program dan kegiatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, KUBE sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi kelompok fakir miskin, termuat esensi modal sosial. Dalam “*Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993: 36)” Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*. Ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut, Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam: a) adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat; b) kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma

mengenai keharusan untuk saling membantu; c) berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.

Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Fukuyama. Dalam karyanya "*Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*" (1995) Fukuyama, pakar sosiologi Amerika keturunan Jepang kelahiran Chicago itu, mengatakan kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Bertolak dari karya pakar modal sosial sebelumnya, Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat bahwa modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan.

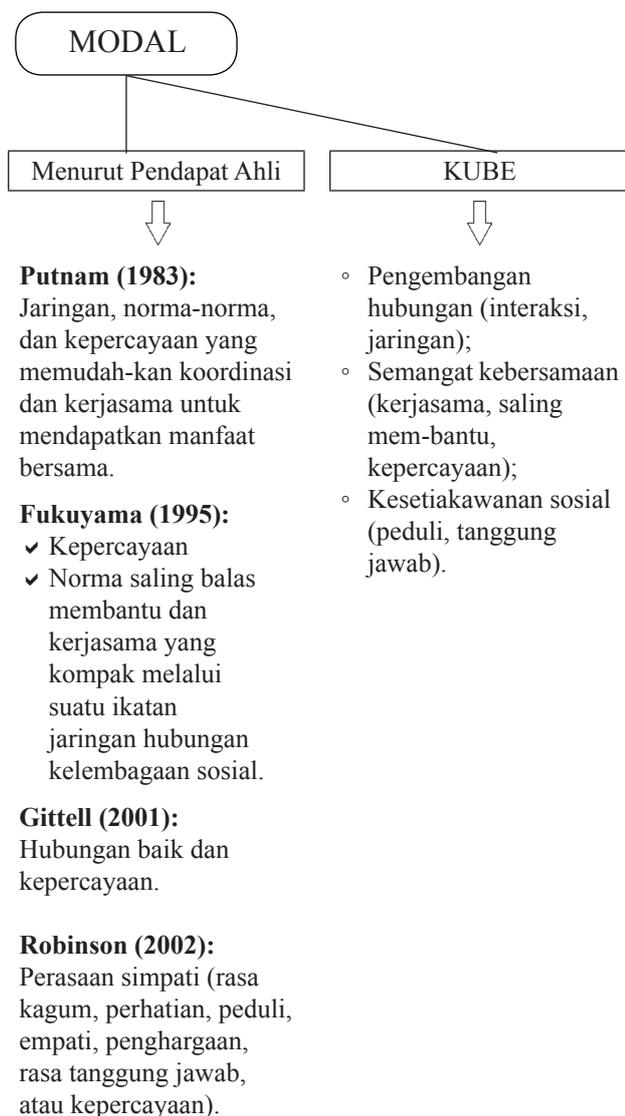
Penelitian yang dilakukan sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa negara, menemukan bahwa modal sosial berperan penting dalam mencapai keberhasilan ekonomi mereka (Gittell, et al., 2001:122). Studi tersebut memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam

menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola pemerintah. Keberhasilan dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemberi bantuan, telah dapat menggantikan jaminan berupa agunan yang merupakan peraturan standar dalam pemberian kredit bank pada umumnya. Dengan kata lain modal sosial yang kuat merupakan "agunan" yang dapat diandalkan. Agunan alternatif ini bisa diterima pihak bank karena dalam masyarakat sendiri telah terdapat kesepakatan untuk memikul tanggung jawab bersama dan saling mengontrol antara sesama warga. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang warga di dalam penggunaan dan pengembalian kredit tidak hanya dianggap sebagai masalah pribadi tetapi merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat dapat menjatuhkan sanksi sosial terhadap warga yang menyebabkan hilangnya kepercayaan itu.

Modal sosial juga dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep yang diajukan oleh Robinson et al. (2002: 5), bahwa dalam berbagai transaksi ekonomi orang-orang yang memiliki modal sosial akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada mereka yang tidak memilikinya. Modal sosial tidak lain adalah perasaan simpati dari seseorang atau suatu kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya. Perasaan simpati itu dapat berupa rasa kagum, perhatian, peduli,

empati, penghargaan, rasa tanggung jawab, atau kepercayaan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Menurut Robison seberapa besar nilai modal sosial yang dimiliki seseorang terhadap orang lain ditentukan oleh seberapa jauh adanya unsur-unsur yang berupa rasa kagum, perhatian, kepedulian, dan lain-lainnya itu pada seseorang terhadap orang lain.

Modal sosial menurut para ahli dan pada KUBE Program Penanggulangan Kemiskinan Fakir Miskin dapat disarikan sebagai berikut:



Secara *Das Sollen*, seperti dikemukakan pada Juklak KUBE (2015), KUBE merupakan media dan sekaligus metode dalam penanggulangan kemiskinan dalam upaya terbentuknya aktivitas sosial dan ekonomi kelompok.

Dari sisi sosial melalui KUBE, fakir miskin diarahkan untuk dapat saling berinteraksi dan saling membantu (peduli satu sama lain) dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Dari sisi ekonomi melalui KUBE, fakir miskin yang terhimpun dalam ikatan kelompok diarahkan untuk memiliki sumber penghasilan berkelanjutan, memiliki aset, terpenuhinya kebutuhan dasar, dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial. Akan tetapi secara *Das Sein*, kenyataan di lapangan tidak selalu indah. Hal itu terlihat dari hasil kajian Sitepu (2016) yang memanfaatkan sekurangnya 15 Karya Tulis Ilmiah (KTI) tentang KUBE, yang menunjukkan bahwa KUBE tidak efektif, karena: (i) keberadaan KUBE di lapangan tidak bertahan lama; (ii) usaha ekonomi yang dibangun tidak berkembang; (iii) kegiatan kelompok terhenti; dan (iv) tujuan KUBE tidak terwujud. Sitepu (2016) dalam kajiannya juga mengemukakan bahwa faktor penyebab ketidakefektifan KUBE disebabkan oleh: a) pembentukan KUBE bersifat dadakan; b) minimnya sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan; c) cenderung top down dalam pelaksanaannya; d) tidak tepat sasaran; e) jenis usaha kurang sesuai dengan sumber daya lokal; f) jenis usaha kurang sesuai dengan kebiasaan (budaya) masyarakat; g) manajemen usaha (dagang) kurang tepat; h) pembagian kerja sesama anggota kelompok dirasa tidak adil; i) kualitas bantuan tidak sesuai (misal: bibit ternak kecil); j) pendamping kurang handal; dan k) pengawasan belum optimal.

Mencermati hasil kajian Sitepu (2016) yang memanfaatkan tidak kurang dari 15 KTI sebagaimana dikemukakan di atas, dimungkinkan karena dalam pelaksanaan KUBE belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional pada pelbagai tingkat pusat, daerah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah tidak maksimal dan ketidakkonsistenan dari pihak-pihak penyelenggaraan KUBE, baik pusat, daerah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa tersebut dalam pelaksanaan KUBE, sejak: persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) sebagaimana petunjuk pelaksanaan/pedoman pelaksanaan KUBE yang dirancang.

Penyelenggaraan KUBE sejauh ini, tidak lebih dari “sekedar” penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada umumnya, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari penyiapan: lokasi, peserta, pendamping, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, kemudian diberikan bantuan stimulan, dan pada akhirnya dilakukan monitoring dan evaluasi, yang targetnya “lebih” selesai secara administrasi (*project oriented*), dan kurang memperhatikan target fungsional (berfungsinya penyandang masalah fakir miskin) secara sosial ekonomi (berdaya) sebagaimana “mimpi” pembuat/penyusun pan-duan/pedoman KUBE, sehingga yang terjadi kemudian adalah KUBE tidak cukup efektif sebagai instrumen dalam pengentasan fakir miskin. Penelitian tentang KUBE yang dilakukan oleh pelbagai pihak di pelbagai daerah/wilayah yang berbeda dalam kurun waktu 2006 sampai 2015, tidak ditemukan bukti kuat bahwa KUBE eksis dan efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin. Usaha ekonomi yang dibangun anggota KUBE dengan menggunakan modal bersama yang berasal dari bantuan pemerintah ternyata tidak berkembang. Persoalan mendasarnya adalah kurang kompetennya sumber daya manusia (SDM) penyelenggara KUBE pada berbagai tingkatan, kelemahan manajerial, keengganan melakukan perubahan (masalah mentalitas), dan/atau keduanya sekaligus (Sitepu, 2016).

Berdasarkan kenyataan empirik tersebut, program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tidak ada istilah terlambat. Menurut Kartasmita (1996) dalam bukunya: *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, pembangunan seringkali diperbaiki sambil berjalan, dan pentingnya dukungan SDM yang handal dan profesional dan konsistensi dari para penyelenggara KUBE pada berbagai tingkatan, baik pusat, daerah: provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dalam melaksanakan dan mengikuti rangkaian/tahapan kegiatan KUBE, sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pedoman KUBE 2015), yaitu: pada tahap persiapan (T0) yang meliputi: identifikasi dan seleksi, orientasi dan observasi, penyuluhan dan sosialisasi, semiloka daerah, pembentukan KUBE, verifikasi administrasi, penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan. Pada tahap pelaksanaan: 1) pemberdayaan tahun pertama (T1), yang meliputi: bimbingan sosial/motivasi, pelatihan keterampilan usaha ekonomi, bimbingan teknis pemanfaatan bantuan, pembukaan rekening kelompok, bantuan stimulan, pendampingan, monitoring dan evaluasi; 2) pemberdayaan tahun kedua (T2), yang meliputi: bimbingan sosial/motivasi, pelayanan akses untuk mendapatkan pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan), bimbingan pengembangan usaha dan kemitraan dengan lintas sektor dan/atau dunia usaha, pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan 3) terminasi (T3), yang meliputi: bimbingan sosial/motivasi, bimbingan teknis penyiapan terminasi, pengakhiran kegiatan, pelimpahan ke pemerintah daerah (Berita Acara), monitoring dan evaluasi.

Mencermati rangkaian tahapan pelaksanaan KUBE seperti dikemukakan, yang sekurangnya dilakukan dalam kurun waktu empat tahun secara berturut-turut (T0-T3), dan didukung

oleh SDM yang handal dan profesional, sehingga dimungkinkan bagi dilaksanakannya tahapan/rangkain kegiatan pelaksanaan KUBE di pelbagai tingkatan sebagaimana dirancang, maka potensi modal sosial pada KUBE seperti dikemukakan “sangat dimungkinkan” dapat mengatasi permasalahan sosial ekonomi anggota kelompok dalam bingkai KUBE. Dengan demikian, secara efektif KUBE dimungkinkan dapat mengatasi permasalahan sosial ekonomi kelompok fakir miskin, dan dengan demikian KUBE dapat benar-benar menjadi alternatif model pemberdayaan kelompok fakir miskin.

## PENUTUP

Dari pembahasan seperti dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa potensi modal sosial pada KUBE sebagai program penanggulangan kemiskinan sektoral yang sejak lama diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, belum cukup mampu memberikan dampak positif yang bermakna bagi peningkatan kesejahteraan fakir miskin. Faktor penyebabnya antara lain adalah tidak didukung oleh SDM yang handal dan profesional pada berbagai tingkatan bagi dimungkinkannya dilaksanakan serangkaian/ tahapan kegiatan KUBE di lapangan. Disarankan penyediaan SDM yang handal dan profesional, baik pada tingkat pusat (Kementerian Sosial), daerah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa, dan konsisten dalam melaksanakan tahapan kegiatan KUBE. Karena pada KUBE termuat esensi pengembangan hubungan, pengembangan kreativitas, semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

Darwin. M. Muhadjir. (2005). *Memanusikan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Benang Merah.

Elfindri dkk. (2008). *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Jakarta: Gorga Media.

Fukuyama, Francis (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.

Gittel, Ross dan J. Phillip Thompson (2001) “Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development” dalam *Social Capital and Poor Communities*; Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren (eds.), pp. 115-135.

Harris-White, B. (2005). Destitution and Poverty of its Politics with Special Reference to South Asia. *World Development* 33:881-891.

Kementerian Kesejahteraan Rakyat. (2004). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Tim Koordinasi Persiapan Penanggulangan Kemiskinan.

Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Penerbit: Cides.

Kementerian Sosial RI. (2014). *Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan.

----- (2015). *Pedoman Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

----- (2016). *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Biro Perencanaan.

- Nasional. (2016). "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. (2016, Maret 10). Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>. Diakses 10 Maret 2016.
- Oetami Dewi. (2016, Maret 17). *Kelompok Usaha Bersama Sebagai Model Untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses dari <https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27/kube-kelom-pok-usaha-bersama-sebagai-model-untuk-pengembangan-pemberdaya-an-masyarakat/>.
- Penduduk Miskin Indonesia bertambah 860.000 orang. (2016, Maret 17). Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/15/142220626/Penduduk.Miskin.Indonesia.Bertambah.860.000.Orang>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Jakarta: Republik Indonesia.
- ..... (2011). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta: Republik Indonesia.
- Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Raffaella Nanetti. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Robison, Lindon J., Marcelo E. Siles, dan A. Allan Schmid. (2001). "Social Capital and Poverty Reduction: Toward a Mature Paradigm" Department of Agricultural Economics, Michigan State University: *Research Report* Number 13, pp 24-26. (Revisi dari makalah yang disampaikan dalam konperensi "Social Capital and Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean", Santiago, Chile).
- Rusydi, Syahra. (2003). "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1. Jakarta: LIPI.
- Sayogyo (1978). Lapisan masyarakat yang paling lemah di perdesaan Jawa. *Prisma* No.3, LP3ES,3-14.
- Suharto, Edi., (2016, Maret 10). *Islam, Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*. Diakses dari [http://www.policy.hu/suharto/Naskah\\_persen20PDF/ModalSosialIslamDompertDhuafa.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah_persen20PDF/ModalSosialIslamDompertDhuafa.pdf).
- Sitepu, Anwar. (2016). "Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Instrumen Program Penanggulangan Fakir Miskin". *Majalah Sosio Informa*, Puslitbangkesos., Volume 01 No. 01, 20-26.
- Tjondronegoro, S. M. P., Soejono, I. dan Hardjono, J. (1996). "Indonemiskinesia" dalam *Rural poverty in developing Asia. Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand*. M.G. Quilibria (Editor). Manila: Published by Asian Development Bank.